

**STRATEGI PEMERINTAH GAMPONG KENAWAT  
REDELONG KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER  
MERIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS  
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**CHANDRA MAULANA IRFANDI  
NIM. 170802020  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chandra Maulana Irfandi  
Nim : 170802020  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 04 Desember 1999  
Alamat : Lamteumen Timur, Jaya Baru

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Maret 2023  
Yang menyatakan



**CHANDRA MAULANA IRFANDI**

170802020

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### STRATEGI PEMERINTAH GAMPONG KENAWAT REDELONG KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

#### SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Asministrasi Negara

Oleh :

CHANDRA MAULANA IRFANDI

NIM. 170802020

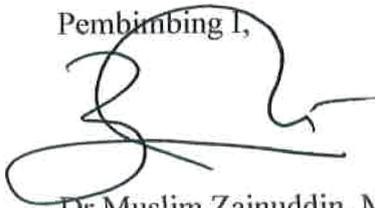
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

جامعة الرانيري

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr Muslim Zainuddin, M.Si.

NIP. 196610231994021001

Pembimbing II,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.

NIDN. 20171117904

**STRATEGI PEMERINTAH GAMPONG KENAWAT  
REDELONG KECAMATAN BUKIT KABUPATEN  
BENER MERIAH DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

SKRIPSI

**CHANDRA MAULANA IRFANDI**

NIM. 170802020

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 26 April 2024 M  
17 Syawal 1445 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.  
NIP. 196610231994021001

Cut Zambarira, S.I.P., M.A.P.  
NIP. 2017117904

Penguji I,

Penguji II,

Eka Januar, M.Soc.Sc.  
NIP. 198401012015031003

Muazzinah, M.P.A.  
NIP. 19841125201903012



Mengetahui  
Dekan,

Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pemerintah gampong memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis dan maju. Salah satu aspek yang menonjol adalah Administrasi pembangunan pemerintah Gampong Kenawat Redelong mengalami peningkatan sejak peralihan masa pemerintahan Reje Gampong. Perbaikan dan pembangunan mulai terlihat di Gampong Kenawat Redelong. Terkhusus untuk kantor desa sendiri, sebagai pusat Administrasi desa sudah semakin meningkat baik dari fasilitas maupun sumber daya manusia yang ada didalamnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah gampong Kenawat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan kualitas administrasi pembangunan, dan kendala apa saja yang dialami Pemerintah Gampong Kenawat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan kualitas administrasi pembangunan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah, wawancara, dokumentasi, serta pencatatan secara sistematis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut Strategi Pemerintah Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Pembangunan adalah dengan saling berkoordinasi dengan semua pelaku terutama pengelola dan pihak pemerintah gampong serta BPD, proses identifikasi dan inventarisasi adalah dengan melakukan perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan musyawarah bersama yakni musrenbang- gampong yang terdiri dari pemerintah Gampong, tokoh masyarakat, dan BPD. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Kenawat Redelong dalam membangun administrasi pembangunan adalah kurangnya partisipasi masyarakat dapat terlihat dari hasil wawancara diatas seperti partisipasi hanya dilakukan hanya pada saat rapat saja

**Kata Kunci :** *Gampong, Pembangunan, Evaluasi, Pengawasan*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Strategi Pemerintah Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Pembangunan”. Shalawat dan salam peneliti persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat islam.

Skripsi ini berjudul “Strategi Pemerintah Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Pembangunan”. Disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry .

Pada awalnya peneliti mengalami kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari peneliti, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan oleh peneliti. Oleh karena itu skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta istimewa dalam hidup peneliti yakni Ibu dan bapak Tercinta dan dengan hati yang tulus peneliti mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhitung kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry .
4. Siti Nur Zalikha, M. Si, Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah UIN Ar- Raniry.
5. Dr Muslim Zainuddin, M.Si. pembimbing I dan Cut Zamharira, S.IP., M.AP. pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing peneliti serta selalu memberikan masukan dengan penuh kesabaran dan keiklasan.
6. Kedua orang tua tercinta yang mendukung saya tiada henti kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu peneliti mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Demikianlah yang dapat peneliti sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 17 Maret 2023

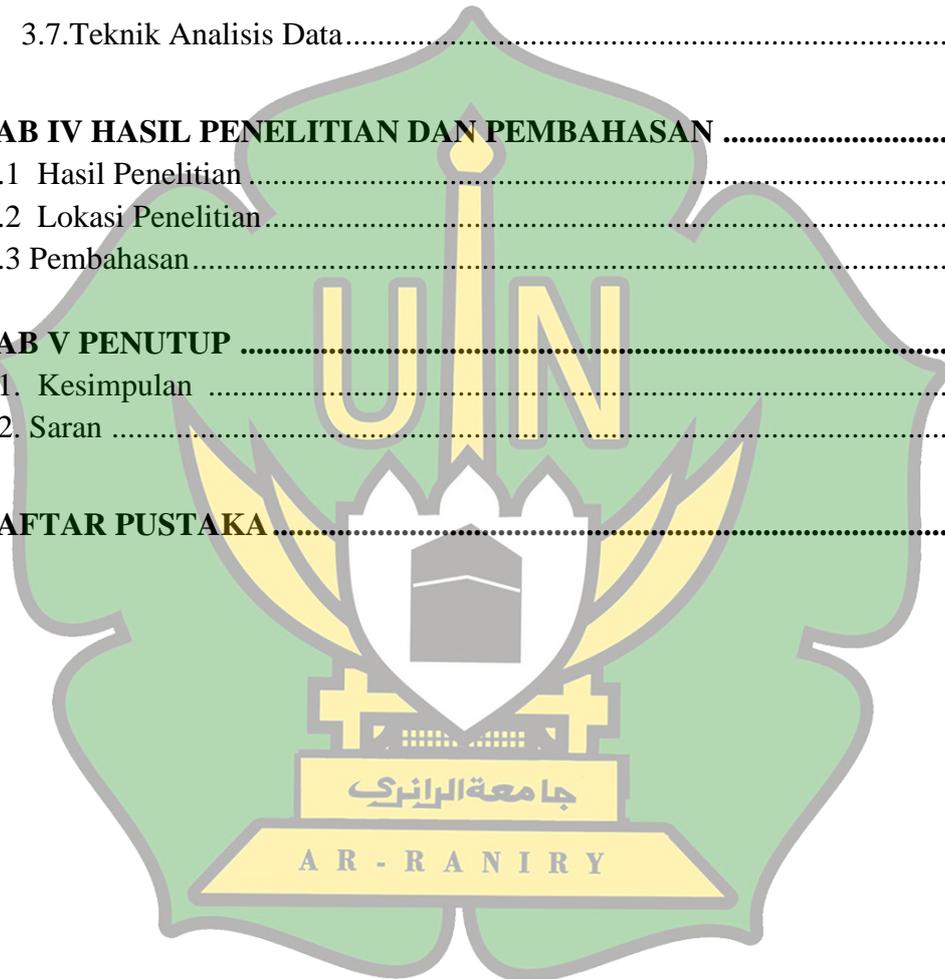
Peneliti

Chandra Maulana Irfandi

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah .....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian .....	8
1.6. Penjelasan Istilah .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	10
2.2. Pembahasan Penelitian yang Relevan .....	11
2.3. Landasan Teoritis .....	14
2.3.1. Teori Administrasi Pembangunan.....	14
2.3.2. Manfaat Administrasi Pembangunan .....	17
2.3.3. Tujuan Administrasi Pembangunan .....	17
2.4. Strategi Pembangunan .....	20
2.5. Kerangka Pemikiran.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1. Desain Penelitian.....	23

3.2. Definisi Operasional Variabel.....	24
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
3.4. Sumber Data.....	25
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6. Teknik Pengolahan Data .....	28
3.7. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	32
4.2 Lokasi Penelitian.....	33
4.3 Pembahasan.....	35
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
5.1. Kesimpulan .....	57
5.2. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Informan Penelitian .....	26
--------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir ..... 22



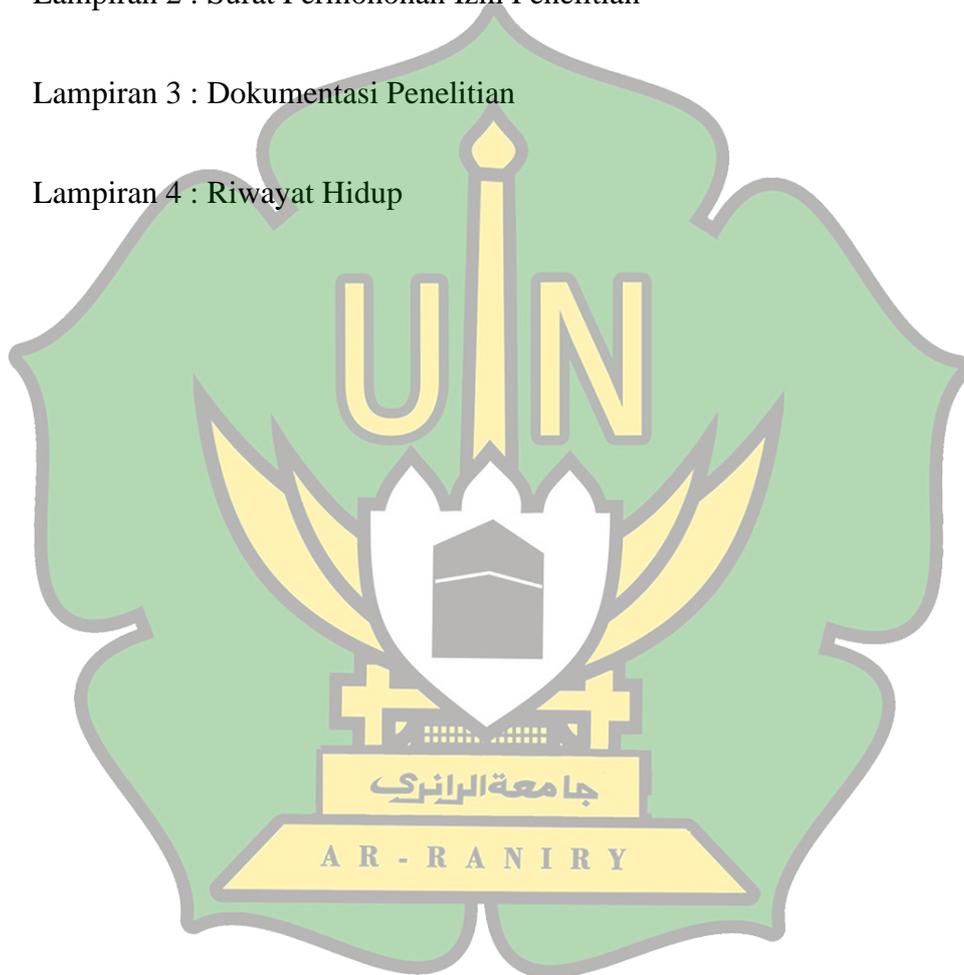
## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fisip UIN Ar- Raniry

Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 : Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala desa yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dimana dalam fungsi dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik terhadap masyarakat agar dapat menumbuhkan kehidupan yang sejahtera, tentram dan berkeadilan.<sup>1</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi. Keberadaan desa di Indonesia diatur dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pemerintahan gampong adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Sarak Opat (Tuha Peut) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan adat istiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam serta memelihara kehormatan wilayah dan warganya.<sup>3</sup>

Pemerintah gampong sangat penting dalam perjalanan suatu negara, karena di pemerintahan gampong merupakan komponen atau bagian kecil dari jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu keberadaanya perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat dan upaya-upaya terhadap peningkatan kualitas Administrasi Pembangunan merupakan faktor terpenting yang perlu diperhatikan.

---

<sup>2</sup> Bella Arinta Lailiani, "Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)", Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hlm 1

<sup>3</sup> Qanun Bupati Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015

Di Dalam pemerintahan gampong Kenawat, peran Reje gampong dan Aparat Gampong sangat dibutuhkan dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Menurut Simamora, mengemukakan bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.<sup>4</sup>

Pembangunan adalah pusat politik yang dapat memainkan peran kunci dalam pembangunan nasional. Administrasi publik dianggap penting dalam proses mekanisme pembangunan ini. Pemerintah menggunakan kewenangan administratif untuk mencapai tugas pembangunan nasional dengan merumuskan, mengatur dan melaksanakan program aksi skala besar. Untuk menangani kegiatan pemerintah yang kompleks ini, instrumen administrasi pembangunan digunakan.

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan merupakan proses multidimensional yang terdiri dari perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional dan

---

<sup>4</sup> Simamora, 2006. Perencanaan Pembangunan, Sinar harapan, Jakarta. Hlm 67

peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang memiliki orientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan baik lahiriah dan batiniah.<sup>5</sup>

Dalam pembangunan Desa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan. Dalam proses pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sehingga perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak, di antaranya pemerintah gampong sehingga adanya keterlibatan pemerintah gampong lebih besar peluang dan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.

Dalam pengertian sempit, administrasi ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor (*office work*), seperti penulisan, pengetikan surat-menyurat (termasuk menggunakan komputer), pengagendaan, pengarsipan, dan pembukuan. Menurut Soewarno Handyaningrat, administrasi dalam arti sempit berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda),

---

<sup>5</sup> Siagian, S. P. (2012). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya* Jakarta : PT Bumi Aksara.

yaitu kegiatan pencatatan, pembuatan surat, pembukuan ringan, pengetikan, pengagendaaan, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.<sup>6</sup>

Administrasi juga dapat diartikan sebagai kerja sama dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama dan memiliki struktur atau terorganisir. Administrasi juga terbagi dalam beberapa bagian salah satunya administrasi pembangunan. Yang dimana tujuannya adalah untuk mencapai atau mendorong suatu program ke arah yang lebih maju.

Menurut Sondang P.Siagian, administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Disamping itu sudah menjadi keharusan bagi pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas Administrasi Pembangunan yang diberikan kepada kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Apabila definisi diatas dimaknai secara cermat, maka muncul beberapa ide pokok:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari

---

<sup>6</sup> Sahya Anggara, Li Sumantri, *Administrasi Pembangunan*, (CV Pustaka Setia, 2016). Hlm 15

<sup>7</sup> Sahya Anggara, Li Sumantri, (2016), Hlm 24.

tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan «bagian» dari suatu yang bersifat tanpa akhir.

2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa mendatang.
4. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multidimensional. Artinya, modernitas disini mencakup segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Modernitas disini diartikan dengan kata lain sebagai cara hidup yang baru dan berkembang kearah yang lebih baik dari sebelumnya, cara pikir yang diharuskan rasional dan sistem budaya yang tetap kuat tetapi fleksibel

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan penelitian pada tanggal 04 April 2023 tentang R Administrasi Pembangunan pemerintah Gampong Kenawat Redelong mengalami peningkatan sejak peralihan masa pemerintahan Reje Gampong. Perbaikan dan pembangunan mulai terlihat di Gampong Kenawat Redelong. Terkhusus untuk kantor desa sendiri, sebagai pusat Administrasi desa sudah semakin meningkat baik dari fasilitas maupun sumber daya manusia yang ada didalamnya. Dan dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat yang menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Dengan melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam Strategi pemerintahan

gampong kenawat kecamatan bukit kabupaten bener meriah dalam meningkatkan kualitas Administrasi Pembangunan

### 1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengidentifikasi bagaimana Strategi pemerintah Gampong Kenawat Redelong dalam meningkatkan Administrasi Pembangunan. Penelitian ini berupaya untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana Administrasi Pembangunan pada Desa Gampong Kenawat Redelong yang telah meningkat pada saat setelah peralihan Reje Gampong Kenawat Redelong.

### 1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Gampong Kenawat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan kualitas administrasi pembangunan?
2. Kendala apa saja yang dialami Pemerintah Gampong Kenawat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan kualitas administrasi pembangunan?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pemerintah Gampong Kenawat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan kualitas administrasi pembangunan.

2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Gampong Kenawat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan kualitas administrasi pembangunan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam menjabarkan kegunaan penelitian berdasarkan permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai Strategi Pemerintahan Gampong Kenawat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan kualitas administrasi pembangunan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain, dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang terkait dengan Strategi Pemerintahan Gampong Kenawat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan kualitas administrasi pembangunan.

### **1.6 Penjelasan Istilah**

Adapun penjelasan istilah –istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi yaitu sebuah rencana yang disatukan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dan target utama dari sebuah organisasi

atau perusahaan, dapat dicapai melalui pelaksanaan dan tindakan yang tepat.

2. Administrasi dapat dipahami sebagai aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Aktivitas kerja sama tersebut ditentukan berdasarkan pembagian kerja yang telah disesuaikan secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.
3. Pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik, dll.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai referensi dalam penyelesaian masalah sebuah penelitian. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil ilmiah dari penelitian terdahulu. Sebab, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai acuan dan pendukung untuk melakukan sebuah penelitian<sup>8</sup>. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian penulis. Berikut beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

1. Bella Arinta Lailiani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya “Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelemahan yang dimiliki oleh Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan desa yaitu terdapat penduduk yang tidak tamat SD, SMP dan SMA sebagian besar masyarakat desa memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani; masyarakat kurang memiliki sikap kebersamaan dalam memecahkan masalah demi tercapainya pembangunan, kurang koordinasi dan masih ditemukan beberapa masyarakat yang enggan menyumbangkan tenaga pada program

---

<sup>8</sup> I Made Laut Mertha Jaya “ *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, penerapan, dan Riset Nyata* ” (Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020). Hlm. 43

pembangunan desa yang bersifat fisik; rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah serta terdapat masyarakat yang kurang menunjukkan partisipasinya.

2. Ambo Asse, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar “Peran Kepala Desa sebagai Administrasi Pembangunan di Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo”. Hasil penelitian ini di simpulkan sebelumnya mengenai Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Mattirowalie Kecamatan Maningpajo Kabupaten Wajo, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan sudah berjalan dengan baik, selaku pemerintah desa sudah menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sabagai administrator pembangunan desa

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana Administrasi Pembangunan dalam prosesnya yang dibutuhkan peran Kepala Desa maupun partisipasi masyarakat. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada fokus penelitian, tempat penelitian dan proses berjalannya Administrasi Pembangunan. Penelitian sebelumnya juga membahas bagaimana peran kepala desa maupun strategi yang dijalankannya dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan.

## 2.2 Pembahasan Penelitian yang Relevan

1. Andrei Wibowo, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Program

Pembangunan Infrastruktur Di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang didukung dari berbagai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui strategi - strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Program Pembangunan Infrastruktur di desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, faktor - faktor apa saja yang menghambat penerapan strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.<sup>9</sup>

Hasil penelitian berupa:

- a. Pelaksanaan strategi pemerintahan sudah baik karena melibatkan peran serta masyarakat dalam pembuatan strategi dengan menampung usulan masyarakat tetapi masih adanya permasalahan dengan oknum yang tidak bertanggung jawab mencari keuntungan dari proyek yang dibuat oleh pemerintahan desa..
- b. Pencapaian tujuan program pembangunan infrastruktur jalan dan drainase bisa dikatakan masih belum tercapai terlihat kurang serius dalam pemilihan bahan material yang akan di gunakan untuk perbaikan menyebabkan jalan kembali rusak yang mengganggu aktifitas masyarakat.

---

<sup>9</sup> Andrei Wibowo 2018 *Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

2. Suartini, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Perkembangan Pemikiran Dan Praktik Administrasi Pembangunan Di Indonesia. Jenis penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview agar nantinya menggambarkan sebagai aspek dari populasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengembangan pemikiran mengenai administrasi pembangunan, serta bagaimana seharusnya administrasi bagi pembangunan.<sup>10</sup>

Hasil penelitian berupa:

- a. Perubahan internal dan eksternal dalam administrasi akan mempengaruhi aspirasi, tuntutan, kemampuan, dan persepsi masyarakat maupun kualifikasi aparatur pemerintah. *The way of governing* berkembang dan dapat berbeda sekarang dengan masa yang akan datang. Ilmu administrasi, termasuk administrasi pembangunan ditantang untuk bisa mengikuti proses perubahan bahkan satu langkah di depan. Betapapun besarnya peranan masyarakat, upaya untuk membangun masyarakat adalah tanggung jawab administrasi pembangunan, diperlukan pembaharuan bukan hanya sistem dan prosedur kerja tetapi juga semangat kerja. Ada dua

---

<sup>10</sup> Suartini (2018), *Perkembangan Pemikiran Dan Praktik Administrasi Pembangunan Di Indonesia*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram

alternatif yaitu perbaikan birokrasi berlangsung secara evolutif dan tidak bisa dipaksakan atau diupayakan untuk mempercepat proses perbaikan administrasi..

- b. Indonesia harus mencambuk diri untuk melompat maju dalam membangun administrasi dengan alasan pertama, ekonomi Indonesia diambang untuk meningkat dari ekonomi berpendapatan rendah menjadi ekonomi berpendapatan menengah. Kedua, terjadi transformasi budaya dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Ketiga, masyarakat Indonesia telah teremansipasi dan mulai melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan. Keempat, globalisasi akan meningkatkan kadar keterbukaan dan informasi bangsa Indonesia. Kelima, liberalisasi perdagangan dan integrasi pandangan dunia membuka peluang-peluang baru dan memberikan harapan baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik secara dipercepat. Kuncinya adalah daya saing yang ditentukan oleh dua hal, produktivitas dan efisiensi.

## **2.3 Landasan Teoritis**

### **2.3.1 Teori Administrasi Pembangunan**

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua

pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Sondang P. Siagian “Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”<sup>11</sup>

Menurut Ginandjar Kartasasmita Administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Hal ini berarti bahwa dalam studi dan praktik administrasi pembangunan diperlukan adanya perhatian dan komitmen terhadap nilai-nilai yang mendasari dan perlu diwujudkan menjadi dasar etika birokrasi. Dengan demikian ada dua sisi dalam batasan pengertian administrasi pembangunan tersebut. Pada sisi pertama tercakup upaya untuk mengenali peranan administrasi negara dalam pembangunan, atau dengan kata lain administrasi dari proses pembangunan, yang membedakannya dengan administrasi negara dalam pengertian umum. Pada sisi kedua tercakup kehendak untuk mempelajari dengan cara bagaimana membangun administrasi negara dan tugas pembangunan. Namun, tidak kalah pentingnya perhatian dan

---

<sup>11</sup> Siagian, Sondang P, “*Administrasi Pembangunan*”, (Gunung Agung, 1982). Hlm. 24

komitmen terhadap kepentingan publik yang dapat menjadi ukuran bagi kredibilitas dan akuntabilitasnya.<sup>12</sup>

Berpijak pada beberapa pengertian administrasi pembangunan seperti yang telah diungkapkan maka ada 2 (dua) pernyataan (kalimat) kunci yang dapat dijadikan sebagai makna atau batasan (pengertian) administrasi pembangunan. Pertama kontribusi administrasi pembangunan terhadap pembangunan nasional yang dikenal sebagai administrasi bagi pembangunan nasional yang mencakup aktivitas-aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dorongan atau motivasi dan pengawasan. Fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh administrator atau manager dan harus didukung oleh pengaturan penggunaan atau pemanfaatan alat atau sarana (*tools of management*), yang terdiri dari atau meliputi atau mencakup 5 M, yaitu: (1) *Man* (orang), (2) *Money* (uang), (3) *Materials* (bahan-bahan), (4) *Method* (cara) dan (5) *Machines* (mesin-mesin). Dalam administrasi pembangunan dikenal sebagai pendekatan manajemen. Kedua pembangunan, perbaikan dan atau reformasi administrasi itu sendiri. Pembangunan ini sebagai upaya agar administrasi pembangunan yang telah disempurnakan dapat mendukung penyelenggaraan tugas atau fungsinya secara lebih baik, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, lebih professional, tertib, akuntabel, transparan dan lain-lain. Untuk pernyataan kedua dikenal sebagai pendekatan organisasi.

---

<sup>12</sup> Ginanjar. Kartasmita, " *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran Dan Praktiknya Di Indonesia* ", (Jakarta:1997)

Lebih singkat lagi dapat ditegaskan bahwa pengertian administrasi pembangunan merupakan pelaksanaan fungsi administrasi negara ( publik) itu sendiri plus fungsi pembangunan.<sup>13</sup>

### 2.3.2 Manfaat Administrasi Pembangunan

Upaya perwujudan pada administrasi pembangunan dimaksudkan untuk :

- a. Memajukan suatu daerah dari segi perekonomian ataupun kemajuan.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat.
- c. Mendorong perkembangan suatu daerah.
- d. Menjadi motivasi bagi daerah lain dengan adanya suatu pembangunan.

### 2.3.3 Tujuan Administrasi Pembangunan

Tujuan pembangunan, yaitu sebagai berikut.

- a. Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan.
- b. Tujuan pembangunan tidak mengenal batas waktu pencapaiannya. Artinya, masih tetap berlaku sepanjang bangsa dan negara tetap ada di muka bumi ini sejalan dengan berkembangnya konsep kesejahteraan bagi masyarakat

<sup>13</sup> Ngusmanto, M.Si, "Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan", (Mitra Wacana Media:2015). Hlm.43

- c. Tujuan pembangunan yang dilaksanakan adalah mencapai masyarakat yang sejahtera dengan hakikat untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya
- d. tujuan utama pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kehidupan secara kreatif, sehat dan berumur panjang.

Menurut Pasalong, pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.<sup>14</sup> Jadi pelayanan publik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Dengan demikian pelayanan publik menurut Mahmudi adalah kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan publik untuk pemenuhan kebutuhan publik.

Menurut Moenir, dalam pelaksanaan suatu pelayanan publik, terdapat beberapa faktor yang mendukung yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung

<sup>15</sup> A.S. Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

1. Kesadaran pegawai. Adanya kesadaran dari pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga membawa pengaruh yang positif dan menimbulkan pelayanan yang baik.
2. Adanya aturan. Adanya aturan dalam organisasi mutlak diperlukan agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dan terarah.
3. Faktor organisasi. Yaitu merupakan pengaturan dan mekanisme kerjanya (sistem, prosedur, dan metode) yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.
4. Faktor kemampuan dan keterampilan. Dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak sehingga menimbulkan pelayanan yang memuaskan.
5. Faktor sarana pelayanan. Adanya sarana pelayanan yang memadai dan mencukupi sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi suatu pelayanan. Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah proses aktivitas/kegiatan pemberian layanan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sasaran layanan publik adalah kepuasan. Hal ini bukanlah sesuatu yang sederhana, disebabkan untuk menciptakan sebuah kepuasan sendiri merupakan proses yang rumit, karena kepuasan seringkali bersifat subjektif sehingga

tidak dapat diukur dengan pasti. Kepuasan sebagai sasaran utama sebuah pelayanan mempunyai dua komponen, yaitu komponen layanan dan produk.<sup>16</sup>

#### 2.4 Strategi Pembangunan

Banyak pengertian strategi menurut para ahli, salah satunya Mintzberg dalam bukunya "*Strategy Process*" mengatakan strategi adalah pola atau rencana yang terintegrasi dari tujuan organisasi. Menurut Grant strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan yang berisi kriteria-kriteria atau alternatif untuk pengambilan keputusan, strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi, strategi sebagai target untuk mewujudkan tujuan organisasi yang dijabarkan melalui visi dan misi. Dengan demikian, strategi adalah langkah-langkah berisikan pola atau rencana program untuk mewujudkan tujuan organisasi yang dijabarkan melalui visi dan misi. Tujuan organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Mempertahankan Identitas Diri Bangsa Indonesia.<sup>17</sup>

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Mengenai definisi strategi berikut ini akan disebutkan beberapa definisi: Menurut Alfred Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Kenneth Andrew strategi adalah

<sup>16</sup> Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

<sup>17</sup> Melkior N.N Sitokdana, Andeka Rocky Tanaamah, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga,

pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut.

Menurut Buzzel dan Gale sebagaimana dijelaskan dalam Agustinus strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.<sup>18</sup> Menurut Konichi Ohinea strategi bisnis adalah keunggulan bersaing satu-satunya maksud perencanaan memperoleh, seefisien mungkin, kedudukan paling akhir yang dapat dipertahankan dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Jadi, strategi perusahaan merupakan upaya mengubah kekuatan perusahaan yang sebanding dengan kekuatan pesaing-pesaingnya, dengan cara yang paling efisien.

Menurut Griffin strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (*Strategi is a comprehensive plan for accomplishing an organization's goals*).<sup>19</sup> Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.<sup>20</sup> Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa dalam merumuskan strategi yang

---

<sup>18</sup> Agustinus Sri Wahyudi. Manajemen Strategi, (Jakarta: Binarupa Aksara,1996) hal:19

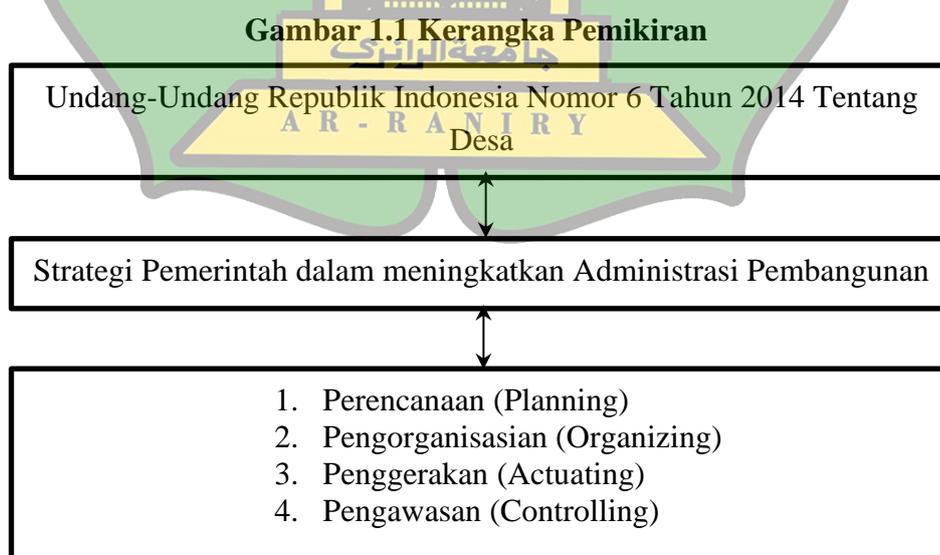
<sup>19</sup> Pandji Anoraga. Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hal:339

<sup>20</sup> Setyo Soedrajat, Manajemen Pemasaran Jasa Bank, (Jakarta:Ikrar Mandiri Abadi,1994), hal: 17

digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada. Strategi adalah keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah pengembangan rencana marketing yang terinci.<sup>21</sup>

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam proposal penelitian kualitatif adalah alur pikir sementara atau proses terjadinya suatu fenomena berdasarkan penelitian pendahuluan yang dikombinasikan dengan kajian pustaka, konsep dan landasan teoritik yang menggambarkan kejadian secara runtut, hubungan sebab dan akibat, pengaruh dari beberapa faktor utama maupun faktor tambahan yang digambarkan dalam bentuk diagram atau bagan<sup>22</sup>. Dengan demikian, sebelum melakukan penelitian dirumuskan kerangka pikir sebagai dasar dalam penelitian yang disajikan dalam gambar berikut :



<sup>21</sup> Philip Kotler. Marketing Management, (Jakarta: Pren Hallindo,1997), hal: 8

<sup>22</sup> Wayan Suwendra, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: NilaCakra,2018), Hlm. 141

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian kali ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta.<sup>23</sup>

Pendekatan kualitatif juga merupakan data yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa/kejadian dan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan ataupun berupa kata-kata<sup>24</sup>

Menurut Denzin & Lincoln dalam moeleong menyebutkan bahwa Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>25</sup>

Sejalan dengan perkembangan penelitian di lapangan maka peneliti melakukan aktivitasnya secara langsung agar memenuhi kriteria penelitian didasarkan pada titik fokus yang diinginkan, sehingga mampu menjabarkan substansi penelitian.

---

<sup>23</sup> Muh. Fitrah, Luthfiya *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2017). Hlm. 44

<sup>24</sup> Eko Putro Widoyoko “*Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*”(Januari 2012) Hlm. 18

<sup>25</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”(Oktober 2018) Hlm. 7

### 3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>26</sup> Kemudian definisi Variabel penelitian harus dirumuskan bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengumpulkan data yang ada. Dalam penelitian kali ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut.

#### 1. Peran Reje Gampong.

Sebagai seorang pemimpin sebuah gampong, Reje gampong, memerlukan yang namanya motivasi untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan gampong. Sebagai seorang Reje gampong harus mampu memberikan dorongan serta menggerakkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam setiap rangka kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan. Karena tujuan dari pembangunan tidak akan dapat terwujud jika tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya. Motivasi yang dapat diberikan oleh Reje gampong yaitu berupa motivasi sosial, fisiologis, maupun pemberian semangat kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan pembangunan gampong.

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan dari segi

---

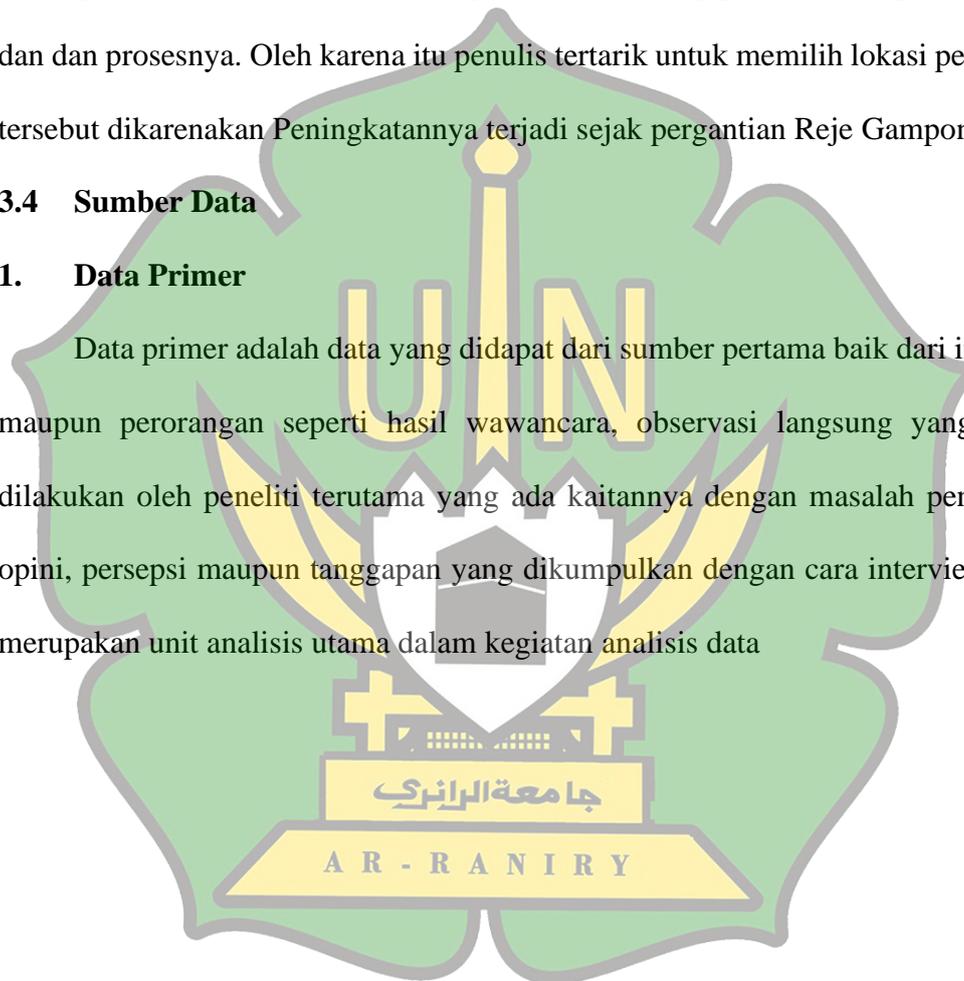
<sup>26</sup> Sugiono , “*Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta), Hlm. 15

pembangunan di Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Penelitian Strategi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Administrasi Pembangunan ini di fokuskan pada bagaimana strategi Reje Gampong dalam meningkatkan Administrasi Pembangunan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan dan prosesnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan Peningkatannya terjadi sejak pergantian Reje Gampong.

### **3.4 Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara, observasi langsung yang dapat dilakukan oleh peneliti terutama yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, opini, persepsi maupun tanggapan yang dikumpulkan dengan cara interview yang merupakan unit analisis utama dalam kegiatan analisis data



**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Reje Gampong	1 orang
2	Sekretaris Gampong	1 orang
3	Operator Gampong	1 orang
4	Tokoh Masyarakat	5 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>8 Orang</b>

*Sumber : olahan peneliti*

### 1. Kepala Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015, Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>27</sup> Kepala desa merupakan faktor penting dalam proses wawancara karena merupakan orang yang bertanggung jawab dalam meningkatkan Desa, dan menjadi orang yang mempertanggung jawabkan suatu Desa.

### 2. Sekretaris Desa

Merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Selain bertugas sebagai koordinator PPKD dalam pengelolaan keuangan desa, ternyata sekretaris desa juga bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015

pemerintahan. Sekretaris desa diperlukan dalam wawancara karena menjadi tangan kanan Kepala Desa, dan orang yang ikut mempertanggung jawabkan Desa.

### 3. Perangkat Desa

Secara umum tugas Perangkat Desa ialah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini sudah diperjelas dalam Undang-undang Desa pasal 49 ayat (1).<sup>28</sup> Perangkat Desa akan mewawancarai karena merupakan orang yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Kepala Desa pada masing-masing bidang.

### 4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.<sup>29</sup> Masyarakat menjadi faktor penting dalam wawancara karena menjadi saksi dan orang yang turut ikut serta dalam meningkatkan Administrasi Pembangunan Desa tersebut.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen tertulis dan sebagai bahan dari kenyataan analisis data dalam penelitian ini merupakan perolehan data berupa dokumen-dokumen resmi yang dimiliki, Peraturan Perundang-undangan, buku, majalah, risalah dan petunjuk pelaksanaannya yang

<sup>28</sup> Undang-Undang Desa pasal 49 ayat (1)

<sup>29</sup> Sulfan dan Mahmud 2018, hlm. 273

berhubungan dengan peraturan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2015.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telpon.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>30</sup> Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi regulasi dan data administrasi.

### **3.6 Teknik Pengolahan Data**

#### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data-data yang diperlukan sudah didapat dan terkumpulkan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kombinasi*” , (Bandung:2015). Hlm.329

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>31</sup> Dalam penelitian kali ini, peneliti akan melakukan proses editing terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait bagaimana proses meningkatkan Administrasi Pembangunan pada gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>32</sup> Hal tersebut dilakukan supaya data yang telah didapatkan menjadi mudah dipahami dan dibaca, serta memberikan informasi yang objektif dan diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah kedalam beberapa bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang telah diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh melalui dokumen.

c. *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Hlm.85

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), Hlm. 104-105

<sup>33</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), Hlm. 84

Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang data yang diperoleh dengan menyerahkan data kepada subjek penelitian, dalam hal ini Reje Kampong dan Perangkat Gampong, dan masyarakat menjadi subjek penelitian. Hal ini dilakukan agar menjamin bahwa data yang didapatkan adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya *Concluding* atau kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data, dan kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya, yaitu: *editing*, *classifying*, dan *verifying*. Kesimpulan inilah yang akan menjadi sebuah data yang terkait dengan objek penelitian peneliti.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu komponen terpenting yang didalamnya terdapat tahap-tahap untuk menemukan hasil penelitian yang asbab. Analisis data yang akan dipilih ialah data interaktif model. Berikut langkah-langkah untuk menganalisis data:<sup>34</sup>

1. Tahap pengumpulan data merupakan setiap data yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahapan kemudian dianalisis yakni menelaah data, memilahnya kedalam satuan-satuan atau memberi kode-kode tertentu, membuat sintesa, berusaha mencari pola berupaya menemukan sesuatu penting “besar” dan unik “unik” sehingga menarik dan perlu dipelajari secara sistematis dalam sebuah laporan penelitian.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Administratif*, (Bandung: Alfabeta 2021), Hlm 08

2. Tahap penyajian data, merupakan data yang diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks naratif. Penyajian data digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian.
3. Tahap reduksi data, memilih dan merangkumkan data-data yang dianggap penting dan relevan fokus penelitian dan penulis. Menurut sugiyono reduksi data adalah kegiatan analisis data dengan cara merangkum, memilih poin-poin penting, agar kemudian dapat menemukan tema-tema dan pola tertentu yang akan mempermudah peneliti. Dalam penelitian ini reduksi data dapat diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi kasus
4. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Miles dan Huberman, “*Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode baru*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,2007), Hlm. 16-18

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Pada Bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang bagaimana strategi pemerintah Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Pembangunan.

#### 4.2 Lokasi Penelitian

Pada Tahun 1931 pindah dari Gampong Kenawat Takengon (Kenawat lut Takengon) Pada dasarnya saat itu mata pencaharian Gampong atau penduduk tergantung kepada sawah, kira-kira kurang lebih pada tahun 1940 mulai membuka hutan dengan menanam tanaman tebu, jadi mata pencaharian penduduk ada 2, yaitu sawah dan kebun tebu. Sesudah Indonesia merdeka barulah masyarakat Gampong Kenawat Redelong menambah mata pencaharian dengan menanam Kopi.<sup>36</sup>

Namun demikian harga kopi pada saat itu tidak menjanjikan, oleh karena itu tanaman kopi tidak dibudidayakan sebagaimana mestinya. Sekitar tahun 1970 an barulah harga kopi agak meningkat, kemudian masyarakat pun terus mengurus kopi secara bersungguh-sungguh. Setelah ada hasil kopi dibeli ternak (Kerbau, Kuda), jadi sejak saat itu masyarakat Gampong Kenawat

---

<sup>36</sup>RPJMK Kenawat Redelong

Redelong sudah bisa dianggap mapan karena mempunyai hasil usaha sebagai berikut:

1. Sawah
2. Kebun Kopi
3. Ternak
4. Pertanian
5. Palawija
6. Perikanan

Kemudian sejak saat itu penduduk Gampong Kenawat Redelong sudah banyak yang bersekolah keluar daerah (Banda Aceh) untuk mengikuti sekolah PGA (Pendidikan Guru Agama), ada yang ke Sumatera barat, Sumatera Utara, Jogjakarta dan Jakarta. begitulah perkembangan Gampong Kenawat Redelong Sampai saat ini sudah menduduki pada pendidikan sarjana strata I maupun strata II dan III.

Secara geografis, topografi Gampong Kenawat Redelong adalah landai berbukit dengan suhu udara rata-rata 17 C pada malam hari dan 32 C pada siang hari. Ketinggian tanah dari permukaan laut dikisaran 1250 – 1350 dpl, dengan banyaknya curah hujan 250 mm/tahun.

## 1. Data Demografi

### a. Letak Demografi Gampong

Gampong Kenawat Redelong termasuk dalam wilayah Kemukiman Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan luas wilayah

± 1000 ha. Secara Administrasi dan Geografis Gampong Kenawat Redelong

Berbatasan dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Isaq Busur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Bukit
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Blang Ara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong delung Asli

b. Kondisi Demografi Gampong

**Kondisi Geografis**

- Banyak Curah Hujan : 250 mm/tahun
- Ketinggian Tanah dari permukaan Laut : 1250 - 1350 dpl
- Suhu Udara Rata Rata : 17°C s/d 32 °C
- Topografi : Landai berbukit

**Orbitasi (Jarak dari Pemerintahan Gampong)**

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan	: 3 Km
Jarak dari pusat pemerintahan kota administrasi	: 4 Km
Jarak ibu kota kabupaten/kota	: 3 Km
Drainase	: 5000 M
Panjang Jalan Kecamatan	: 3.5 Km
Panjang Jalan Gampong	: 3 Km
Panjang Jalan Setapak	: 1000 M

### 4.3 Pembahasan

Komponen pendapatan asli gampong terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah. Ketiga komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan konstruksi bagi penerimaan pendapatan asli Gampong. Masing-masing Gampong terdapat beberapa potensi yang dijadikan sumber pendapatan asli Gampong yang dapat meningkatkan komponen tersebut. Bapak Hidayatullah (Sekretaris Gampong) yang mengatakan bahwa:

“Untuk sumber-sumber pendapatan asli Gampong Kenawat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang pertama bersumber dari BUMG, kebun Gampong, rumah Gampong, yang sumber penghasilan sisa masuk ke Gampong selaku sumber pendapatan asli Gampong dari sisa alokasi hasil usaha, terus sumber-sumber yang mengikat, itupun ada beberapa usaha-usaha yang sekiranya seperti sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari perusahaan pada saat kita melakukan kegiatan 17 Agustus atau kegiatan pembangunan dan sebagainya itu tidak istilahnya mengikat, itu hanya sumbangan kepada pembangunan gampong saja.<sup>37</sup>

Sumber-sumber tersebut akan menambahkan pendapatan gampong untuk menunjang kegiatan operasional gampong. Sumber-sumber yang digunakan dalam membiayai kegiatan pembangunan berasal dari pendapatan asli gampong, alokasi dana gampong, dan bantuan keuangan dari pemerintah Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Pendapatan asli gampong tersebut dialokasikan ke gampong dengan persentase yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gampong. APBG gampong, diharapkan akan mampu

<sup>37</sup>Hasil wawancara tanggal 15 April 2023 dengan Sekretaris Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

mendorong roda pemerintahan di tingkat gampong, termasuk untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang mampu ditangani di tingkat gampong. APBGampong yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Partisipasi warga yang bersifat mikro mampu ditangani pada level gampong. Supaya alokasi pemerintahan gampong (Pemerintah Gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong) dalam mengelola keuangan Gampong, khususnya peningkatan Pendapatan Asli Gampong yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong.<sup>38</sup> Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

1. Perencanaan (*Planning*) merupakan pemilihan fakta-fakta atau realita dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hidayatullah (Sekretaris Gampong) yang mengatakan bahwa:

“Sistem Perencanaan tetap dengan dasar musyawarah. Melibatkan BPD maupun gampong.”<sup>39</sup>

2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan

<sup>38</sup>Yabbar, Rahmah dan Ardhi Hamzah (2015) *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka.

<sup>39</sup>Hasil wawancara tanggal 15 April 2023 dengan Sekretaris Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Reje Gampong Kenawat Redelong Bapak Masruri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah:

“...Sumber-sumber yang lain dengan pengorganisasiannya membentuk tim khusus melalui surat keputusan. SKnya dibebankan kepada PAD gampong untuk membiayai sumber-sumber yang berkaitan dengan sumber pengeluaran, dan yang lainnya sama juga membentuk tim khusus juga”.<sup>40</sup>

3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Terkait dengan pemaparan dari Sekretaris Gampong Hidayatullah, menyatakan :

“Disamping Mengawasi, Bapak Reje Gampong juga menyampaikan laporan kepada saya, laporan tertulis dan tidak tertulis (secara lisan) terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan atau pendapatannya itu sebelum disampaikan ke masyarakat”.<sup>41</sup>

Sebagian besar pengelolaan pendapatan asli Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sudah dikelola dengan teratur

<sup>40</sup>Hasil wawancara tanggal 15 April 2023 dengan Reje Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Tanggal 15 April 2023 dengan Sekretaris Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

dimana pemerintah Gampong membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban kepada pihak pemerintah Gampong yang dimana tim khusus tersebut diberikan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Reje Gampong. Pendapatan asli Gampong dapat dioptimalkan melalui berbagai tindakan maupun proses yang nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan itu sendiri. Dimana dengan meningkatnya pendapatan asli Gampong, maka akan dapat menambah atau meningkatkan perekonomian Gampong. Tindakan yang digunakan dapat berupa pengelolaan terhadap pendapatan asli Gampong sendiri dengan meningkatkan potensi-potensi yang dapat menjadi pendukung dalam pendapatan asli Gampong. Menurut Reje Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener meriah Bapak Marsuri yaitu tentang optimal atau belum dalam hal pengelolaan pendapatan asli Gampong yang dilakukan, menegaskan:

“Sumber Pendapatan yang dibidang optimal baru sedikit, kita masih melakukan pendekatan. Karena ibaratnya sudah punya lahan, rumah Gampong sendiri anggapannya tahun depan biar dapat menambah lagi PAD dengan menambah rumah Gampong, atau lahan agar PAD dapat meningkat”.

Pengelolaan pendapatan asli Gampong yang dilakukan oleh Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dapat dioptimalkan dengan bekerjasama dengan BUMGampong memperbanyak rumah sewa Gampong dalam pengelolaannya. Pengelolaan tersebut juga sudah menerapkan asas pengelolaan keuangan Gampong yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan setidaknya harus diketahui oleh semua masyarakat Gampong dalam

hal kejujuran pemerintah Gampong dalam mengalokasikan dana baik dari pendapatan asli Gampong maupun dari dana pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Reje Gampong Kenawat Redelong Bapak Masruri yang menegaskan:

“Dalam realisasi penggunaan anggaran kuncinya terbuka dengan memasang papan-papan kegiatan. Satu sumber alokasi baik itu dana Gampong, alokasi dana Gampong, pembagian pajak, retribusi sampai sumber pendapatan asli Gampong itupun sesuai dengan program, pengadaan-pengadaan sarana perkantoran terus yang kedua bidangnya adalah pembinaan masyarakat itu melibatkan seluruh pihak baik PKK, Karang Taruna dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan.<sup>42</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris Gampong Kenawat Redelong Bapak Masruri yakni sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban itu dibuat oleh Gampong dan disampaikan ke BPD setelah disetujui BPD atau disepakati baru disampaikan kepada BPD namanya laporan keterangan perbekel nanti disebarluaskan ke masing-masing dusun. Kadang juga Reje Gampong mengundang masyarakat kesini, terutama BPD, Kepala Dusun, Ketua Kelompok dan disanalah Reje Gampong menyampaikan pertanggung jawabannya.<sup>43</sup>

Proses penyelenggaraan pemerintahan Gampong diatur dalam UU No, 5 Tahun 1979. Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat dilihat bahwa unsur pemerintahan Gampong terdiri dari Reje Gampong dan lembaga musyawarah Gampong. Reje Gampong sebagai pucuk pimpinan Gampong, dibantu oleh

<sup>42</sup>Hasil Wawancara Tanggal 15 April 2023 dengan Reje Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Tanggal 15 April 2023 dengan Reje Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

sekretaris Gampong dan kepala dusun. Menurut perundang-undangan, Reje Gampong memegang peranan sebagai lembaga eksekutif, untuk membentuk peraturan, pelaksanaan kebijakan, penyelesaian sengketa, melakukan pembinaan masyarakat, juga berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional, efektif, efisien, dan bersih. Melalui UU No. 6 Tahun 2014, masa jabatan kepala Gampong diperpanjang menjadi selama 6 (enam) tahun untuk satu kali masa jabatan, dan bisa dipilih kembali sampai tiga kali. Dalam melakukan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, Reje Gampong dibantu sekretaris Gampong yang mengurus urusan administrasi dan kesekretariatan Gampong. Reje Gampong juga dibantu untuk menangani masing-masing bidang urusan khusus, oleh kepala urusan (kaur). Sementara kepala dusun berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Reje Gampong, untuk disosialisasikan dan diterapkan di wilayahnya (dusun).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, posisi Reje Gampong disejajarkan dengan lembaga musyawarah Gampong, yakni Badan Permusyawaratan Gampong, yang berfungsi sebagai legislatif di tingkat Gampong. Sama halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, BPD juga memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, dalam tata kelola pemerintahan Gampong. Badan Permusyawaratan Gampong juga berkewajiban untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga pemerintahan dan pembangunan Gampong selalu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Gampong. Jika dikaitkan dengan perwujudan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peran BPD sebagai pengawas menjadi sangat penting.

Fungsi pengawasan yang dipangku BPD, bisa menjadi salah satu instrumen perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga *good government governance* bisa tercipta dari lingkup pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat.<sup>44</sup>

Secara singkat, penyelenggaraan pemerintahan bisa dipaparkan bahwa sekretaris Gampong, kepala urusan, kepala dusun, bertanggungjawab kepada Reje Gampong sebagai puncak pimpinan pemerintahan Gampong.<sup>45</sup> Sementara BPD berperan sebagai pengawas dan bekerjasama dengan Reje Gampong untuk urusan pemerintahan Gampong, dalam upaya mensejahterakan masyarakat Gampong. Setiap tahun, Reje Gampong wajib untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada bupati melalui camat, untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan memutuskan pembinaan lebih lanjut. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Badan Permusyawaratan Gampong (BPD) sebagai pengawas pemerintah Gampong.

Sumber pendapatan R Gampong Kenawat Redelong dalam membiayai kegiatan pembangunan berasal dari pendapatan asli Gampong, Alokasi Dana Gampong (ADG) dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah. Sumber pendapatan Gampong yang berupa Pendapatan Asli Gampong (PAGampong) dapat dioptimalkan oleh pemerintah Gampong agar dapat menambah jumlah pendapatan. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini

---

<sup>44</sup>Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis. Vol 12. No 1

<sup>45</sup> Mulyana Nana, dkk, 2012. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pelatihan Manajemen Kelembagaan Desa Bagi Sekretaris Desa. FISIP UNILA.

mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya.

Sebagai Gampong yang agraris dan cocok di bidang pertanian, serta termasuk sebagai Gampong wisata, masih banyak potensi di Gampong Kenawat Redelong yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli Gampong seperti adanya kerjasama antara wisata-wisata yang sudah berkembang di Gampong Kenawat Redelong dengan BUMGampong Gampong Kenawat agar dapat lebih meningkatkan pendapatan Gampong. Dalam hal pengelolaan pendapatan asli Gampong yang dilakukan pemerintah Gampong di Gampong Kenawat Redelong sudah sesuai dengan pengelolaan pada umumnya dari perencanaan sampai pada tahap pengawasan yang dilakukan berdasarkan wawancara yang dilakukan.

BUMGampong merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi Gampong dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Gampong. Pengaturan BUMGampong diatur di dalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Gampong, yang didalamnya mengatur tentang BUMGampong,

yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Gampong, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Gampong. Tujuan BUMGampong yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset Gampong yang ada, memajukan perekonomian Gampong, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong. Sifat usaha BUMGampong adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Fungsi BUMGampong adalah sebagai motor penggerak perekonomian Gampong, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Gampong (PAGampong), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong.

Dengan kehadiran BUMGampong ini diharapkan Gampong menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Peran BUMGampong tersebut berdasarkan wawancara dengan ketua pengelola BUMGampong, sudah sesuai untuk dapat meningkatkan pendapatan asli Gampong yang nantinya akan dapat menambah pendapatan Gampong yang digunakan untuk kegiatan pembangunan Gampong guna meningkatkan perekonomian Gampong di Gampong Kenawat Redelong. Dengan lebih menggali potensi-potensi yang ada di Gampong Kenawat Redelong, akan memungkinkan adanya peningkatan juga di dalam pendapatan asli Gampong tersebut. Karena tidak dipungkiri Gampong tidak dapat terlepas dari Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer merupakan retribusi terbesar yang diperoleh Gampong untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat jangka panjang, seperti pembuatan jalan Dan jumlahnya pun

terlampau sangat besar dibandingkan pendapatan yang lainnya. Dana dari pendapatan asli Gampong hanya digunakan untuk pembangunan yang bersifat menengah, seperti perbaikan kantor BUMGampong. Maka dari itu, dengan makin bergantungnya Gampong terhadap dana dari pemerintah, peran BUMDes diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong agar Gampong dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Gampong Kenawat Redelong dengan baik sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli Gampong pada khususnya dan pendapatan Gampong pada umumnya. Pengelolaan Pendapatan Asli Gampong dalam Perekonomian Gampong.

UU No. 6 tahun 2014 pasal 77 bahwa pengelolaan kekayaan milik Gampong dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong serta meningkatkan pendapatan Gampong. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi Gampong.<sup>46</sup> Maka perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan segala potensi-potensi yang ada di Gampong Kenawat Redelong, baik potensi alam maupun potensi yang dimiliki manusianya. Potensi bidang pertanian dan perdagangan menjadi daya dukung Gampong Kenawat Redelong. Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan pembangunan di segala sektor wilayah Gampong Kenawat Redelong, oleh sebab itu segala potensi yang ada tentunya harus dioptimalkan agar Gampong Kenawat Redelong menjadi Gampong yang mandiri dan dapat mewujudkan otonomi Gampong sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014.

---

<sup>46</sup>Saputra, K. A. K., Pradnya Nitasari, P. D., Priandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pemerintah Gampong selalu menetapkan strategi agar saling berkoordinasi dengan semua pelaku terutama pengelola dan pihak pemerintah Gampong serta BPD. Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik maka tujuan untuk dapat meningkatkan perekonomian Gampong dapat dilakukan dengan teratur dan terstruktur di masing-masing pengelolaannya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Gampong, maka salah satu alternatif yang dilakukan adalah mengembangkan pendapatan asli Gampong.

Sumber pendapatan asli Gampong akan menghasilkan output secara maksimal bagi pemerintah Gampong jika ditunjang dengan strategi yang digunakan pemerintah Gampong dalam mengelola pendapatan asli Gampong. Berbagai strategi dibutuhkan dalam mengelola pendapatan Gampong supaya efektif dan bermanfaat bagi masyarakat yaitu identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan Gampong. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan Gampong merupakan tahap proses mengetahui jumlah dan nilai kekayaan yang dimiliki Gampong, baik yang saat ini dimanfaatkan maupun yang masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan. kegiatan ini merupakan dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan yang dimiliki oleh Gampong Kenawat Redelong. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang no.6 tahun 2014 pasal 77 ayat 2 tentang aset Gampong.

Strategi yang telah dilakukan Gampong Kenawat Redelong dalam proses identifikasi dan inventarisasi adalah dengan melakukan perencanaan

pembangunan dilakukan berdasarkan musyawarah bersama yakni Musrenbang-Gampong yang terdiri dari pemerintah Gampong, tokoh masyarakat, dan BPD. Alur selanjutnya yaitu pembuatan peraturan Gampong, setelah peraturan Gampong sudah ditetapkan maka langkah selanjutnya yaitu proses pengajuan pembangunan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Buleleng (Bappeda). Sehingga potensi pendapatan asli Gampong yang dimiliki Gampong Kenawat Redelong dapat berkembang yang terdiri dari:

- 1) BUMGampong
- 2) Kebun Gampong
- 3) Rumah Gampong

Sehingga dengan adanya identifikasi terkait kekayaan pendapatan asli Gampong yang dimiliki, maka Gampong bisa mengelola dan mengembangkan pendapatan asli Gampong nya secara maksimal. Dengan hasil pendapatan asli Gampong dapat pula pemerintah Gampong diharapkan mampu mengembangkan sarana prasarana untuk mendukung lajunya kebutuhan masyarakat terutama di bidang perdagangan, dan pertanian. Perlunya sistem informasi manajemen kekayaan Gampong untuk mendukung pengelolaan kekayaan Gampong secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan kekayaan Gampong, maka pemerintah Gampong perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

Sistem informasi manajemen Gampong Kenawat Redelong terkait pengelolaan pendapatan asli Gampong berupa database kekayaan yang dimiliki

oleh Gampong, yang terdiri dari inventarisasi sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli Gampong, perolehan hasil pengelolaan pendapatan asli Gampong tiap tahun, peningkatan pendapatan asli Gampong, struktur organisasi pengelola pendapatan asli Gampong.

Sistem informasi manajemen bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan dalam penyusunan anggaran pembangunan Gampong serta bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. Sistem informasi manajemen Gampong Kenawat Redelong lebih menekankan pada kelengkapan database meskipun hanya sekadar database secara manual sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah kabupaten. Untuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat sudah terlaksana terkait pemerintah Gampong sudah menyediakan akses terbuka seperti salah satunya adalah website resmi Gampong Kenawat Redelong, dan juga secara transparan masyarakat Gampong dapat hadir di dalam rapat terkait pertanggungjawaban keuangan Gampong. Sehingga sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pendapatan asli Gampong Kenawat Redelong sudah maksimal dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan Gampong, sangat penting dilakukan untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan pemerintah Gampong dengan standar yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan

kekayaan yang dimiliki Gampong. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan pengelolaan pendapatan asli Gampong, Gampong Kenawat Redelong memakai peran masyarakat sebagai pengawasan secara langsung yakni dengan memberdayakan masyarakat sebagai pengelola pendapatan asli Gampong yang terbentuk dalam tim khusus. Peran masyarakat dalam pengelolaan pendapatan asli Gampong di Gampong Kenawat Redelong merupakan bentukan dari Reje Gampong dan perangkat Gampong sebagai tim pengelola serta pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pemerintah Gampong. Sistem pengawasan ini berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena adanya keterlibatan secara langsung masyarakat sebagai pengelola dan pengawas. Selain itu pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan Gampong dengan cara diatas terbukti efektif karena masyarakat dirasa lebih berperan aktif dalam keikutsertaan membangun Gampong melalui pengelolaan pendapatan asli Gampong. Keterlibatan jasa penilai dalam otonomi Gampong pemerintah Gampong memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengelola kekayaannya, untuk itu pemerintah Gampong dituntut untuk dapat mengelola kekayaan Gampong secara profesional. Kunci keberhasilan dari pemerintah Gampong Kenawat Redelong dinilai dari sejauh mana hasil kinerja yang telah dilakukan, maka diperlukan jasa penilai sebagai bentuk evaluasi dalam kinerja pemerintah Gampong Kenawat Redelong.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Gampong sudah cukup optimal dalam menyampaikan informasi mengenai tujuan dari pembangunan Gampong Kenawat Redelong Kecamatan bukit Kabupaten Bener

Meriah. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar informan menyatakan bahwa pemerintah Gampong sudah cukup optimal dalam menyampaikan mengenai tujuan dari pembangunan Gampong.

Hal ini tentu saja sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Adisasmita menyatakan “pembangunan gampong merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia per Gampong dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan per Gampong”.<sup>47</sup> Dan ini sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Gampong menyusun perencanaan Pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong. Masyarakat Gampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Gampong, Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong, Pemerintah Gampong didampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan Gampong, Reje Gampong dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan

---

<sup>47</sup> Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

masyarakat Gampong, dan/atau pihak ketiga Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan Gampong mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong. Adapun rencana/agenda dari Reje Gampong Kenawat Redelong sendiri selama masa jabatannya pembangunan Ekonomi. Hal ini menjadi program prioritas Gampong tersebut dikarenakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, serta pembangunan yang lainnya yakni membangun infrastruktur Jalan untuk memudahkan akses jalan.

Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yakni Reje Gampong, Sekretaris Gampong, Aparatur Gampong dan masyarakat dari Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan indikator pelaksanaan pembangunan, pada peran Reje Gampong dalam pembangunan infrastruktur Jalan dan prioritas Pembangunan Ekonomi di Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah mengenai dalam penyusunan RPJM Gampong dengan melibatkan seluruh unsur Masyarakat atau tidak, Melalui wawancara yang dilakukan bersama Bapak Masruri (Reje Gampong) Hidayatullah (Sekretaris Gampong) yang mengatakan bahwa:

“Tentu kita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong kami, melibatkan semua unsur masyarakat baik itu dari masyarakat, aparat kepolisian, aparat TNI serta tokoh adat, tokoh agama kita mengundang

seluruh nya dan mengadakan pertemuan di balai Gampong untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam pembangunan”.<sup>48</sup>

Dan tentu saja dalam pembuatan RPJM memang selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat. Kita selalu ada musyawarah bersama dengan seluruh staf dan masyarakat mengenai apa saja kebutuhannya masyarakat Gampong yang mendesak. Berdasarkan wawancara di atas mengatakan bahwasanya pemerintah Gampong dalam melakukan rencana penyusunan pembangunan jangka menengah selalu melibatkan masyarakat, kemudian hampir senada dengan yang dikatakan oleh ibu Fauziah selaku aparatur Gampong mengatakan bahwa :

“kami melibatkan masyarakat, bermusyawarah, tokoh adat, tokoh agama, kantibnas, babinsa semua diundang, dan kepala dusun serta warganya untuk mewakili keseluruhan masyarakat, Semua tokoh terlibat pemerintah Gampong, BPD, masyarakat semua terlibat untuk menyusun rencana pembangunan.”<sup>49</sup>

Jadi, berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya Partisipasi masyarakat yang ada belum memberikan hasil yang maksimal. Dan hal ni diketahui hampir sebagian dari sebagian masyarakat yang ada di Gampong Kenawat Redelong belum ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan Gampong Kenawat Redelong.

Berdasarkan indikator Pelaksanaan pembangunan, pada peran Reje Gampong dalam pembangunan infrastruktur jalan di Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sudah sesuai dengan

<sup>48</sup> Hasil wawancara tanggal 15 April 2023 dengan Reje Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

<sup>49</sup> Hasil wawancara tanggal 15 April 2023 dengan Aparatur Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pedoman pembuatan rencana pembangunan Gampong. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancaranya dengan Bapak Masruri (Reje Gampong) dan Bapak Hidayatullah (Sekretaris Gampong) mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan Pembangunan kami lakukan sesuai dengan hasil musrenbang dan disusun di dalam RPJM berdasarkan sesuai dengan peraturan, seperti kita embuat ini RPJM berdasarkan hasil musyawarah antara pemerintah Gampong dengan segala unsur yang ada di Gampong.”<sup>50</sup>  
“pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan ekonomi berdasarkan RPJM dan hanya menambahkan team pelaksana kegiatan.”<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara diatas mengatakan bahwasanya pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Gampong yang dilakukan oleh pemerintah Gampong sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Selanjutnya wawancara dilakukan bapak Muhammad (Masyarakat) dan bapak Riski (Masyarakat) dan mengatakan bahwa:

“Setahu saya, karena RPJM ini ada agendanya mulai dari penyusunan sampai penetapan kemudian dan melakukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh TPK dan diawasi oleh Sarak Opat”<sup>52</sup>

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama masyarakat yang lain yakni Bapak Zainul, Bapak Putra dan Bapak Abas mengenai pelaksanaan pembangunan Gampong berdasarkan pedoman dan ketetapan yang telah diatur dan mengatakan bahwa:

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Masruri selaku Reje Gampong pada tanggal 15 April 2023

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hidayatullah selaku Sekretaris Gampong tanggal 15 April 2023

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad selaku masyarakat tanggal 17 April 2023

“menurut saya pembangunan yang dilakukan sangat membantu masyarakat, karena ini memudahkan kami dalam berkendara, hal ini berdampak sangat baik karena mengurangi angka kecelakaan masyarakat.<sup>53</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dapat terlihat dari hasil wawancara diatas seperti partisipasi hanya dilakukan hanya pada saat rapat saja. Kurangnya partisipatif aktif masyarakat yang terjadi akibat beberapa faktor dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan jika dilakukan penanganan tepat peran serta tokoh masyarakat dalam memberikan penguatan terhadap pembangunan Gampong dapat memberikan peningkatan partisipasi dari seorang masyarakat Gampong pada suatu pembangunan.

Banyaknya pembangunan yang ada di Gampong mencerminkan bahwa semakin banyaknya partisipasi yang diharapkan dari seluruh lapisan masyarakat. Semakin banyak pembangunan yang ada maka semakin banyak ide yang diharapkan muncul serta banyaknya masukan yang diharapkan. Pengawasan terhadap pembangunan juga sangat dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi.

Dalam pencapaian tujuan, keberhasilan yang tercapai oleh suatu organisasi tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya dan berharga sebaik mungkin dalam usahanya mengejar tujuan kegiatannya. Dalam hal ini Gampong berbasis kerakyatan masyarakat Gampong juga diperlukan sumber daya manusia masyarakat Gampong yang berkualitas mengerti dan dipahami aturan-aturan dan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Zainul tanggal 15 April 2023

manajemen pengelolaan, maka dari itu pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Gampong turut melakukan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dengan membuka simpan pinjam untuk para pengantin dan calon pengantin. Badan Usaha Milik Gampong (BUMGampong) merupakan wadah swadaya yang pada hakekatnya merupakan wadah yang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, namun keadaan saat ini banyak yang tidak mampu berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Reje Gampong Masruri beliau mengatakan:

“pemberdayaan masyarakat melalui Unit Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong Kenawat Redelong berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat. Terdapat dua indikator diantaranya adalah Bina Masyarakat, Membina Usaha”<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMG Gampong Kenawat Redelong memiliki arah dan konsep yang jelas hal ini dapat dilihat dari konsep yang dipaparkan, lalu hal ini juga dirincikan lagi oleh Kasi Pemerintahan di kantor Gampong dengan menjelaskan:

“Bina Masyarakat yang dimaksud dalam indikator dan konsep kami adalah pembangunan untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini kami memberikan simpan pinjam kepada para pengantin dan calon pengantin. Dengan memanfaatkan potensi masyarakat dan potensi daerah dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Dan bina Usaha yang kami lakukan akan berdampak bagi kesejahteraan dengan memberikan simpan pinjam kepada pelaku usaha UMKM”.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Masruri Selaku Reje Gampong tanggal 15 April 2023

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan kasi pemerintahan tanggal 15 April 2023

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha simpan pinjam pada BUMG Gampong milik Gampong Kenawat Redelong sudah baik, hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara dengan Bapak Masruri menyatakan:

“saya selaku pelaku usaha UMKM sangat merasa terbantu, karena dengan adanya simpan pinjam ini saya bisa membangun kembali usaha saya, dengan bunga yang ditawarkan rendah.<sup>56</sup>

Hal serupa juga disebutkan oleh Ibu Khadijah yang menyatakan:

“saya pernah mengambil pinjaman di Kantor Gampong untuk anak saya, saya memberikannya kepada anak saya sebagai modal usaha setelah menikah, dan Alhamdulillah semua dipermudah oleh aparat Gampong dan bapak Reje Gampong. Saya berharap hal ini tetap terus berjalan sebagaimana mestinya, karena sangat membantu perekonomian kami masyarakat.<sup>57</sup>

Seperti halnya wawancara diatas, peran BUMG gampong Kenawat Redelong sangat berperan aktif terhadap pembinaan masyarakat dan pembinaan usaha sesuai dengan indikator yang dipaparkan pada wawancara diatas.

Strategi pengelolaan pendapatan asli Gampong dalam meningkatkan pembangunan Gampong Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah merupakan strategi yang tepat dalam meningkatnya pendapatan asli Gampong, begitu pula dengan pendapatan asli Gampong yang mampu memberikan sumber pemasukan secara meningkat tiap tahunnya juga dapat mempengaruhi dalam proses pembangunan Gampong.

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan bapak marsuri pada tanggal 16 April 2023

<sup>57</sup> Wawancara dengan ibu Khadijah sebagai masyarakat pada tanggal 16 April 2023

Berdasarkan observasi di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan pembangunan Gampong secara fisik yaitu dengan adanya pengaspalan jalan sepanjang 5 km yang sudah terealisasi guna untuk kelancaran masyarakat Gampong dalam kegiatan sehari-harinya, selain itu peningkatan pendapatan lainnya juga dikelola secara efektif sehingga memberikan dampak positif terhadap kemajuan Gampong dan kesejahteraan masyarakat Gampong Kenawat Redelong. Sejalan dengan pembangunan Gampong dari segi aspek fisik, pembangunan sumberdaya manusia Gampong Kenawat Redelong juga mengalami peningkatan khususnya dalam pengembangan usaha ekonomi melalui pelatihan pengembangan produk lokal. Masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai untuk bisa mengembangkan produk-produk lokalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gampong Kenawat Redelong dapat membangun, memanfaatkan, dan mengeksplorasi dengan tepat (optimal, efektif, dan efisien). Dimana segala potensi dan sumber daya yang telah dimiliki Gampong mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan memberikan perubahan kearah yang lebih baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan dana gampong, pemerintah Gampong Kenawat Redelong sudah berperan cukup baik di setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana gampong yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan mengadakan musyawarah dusun dan musyawarah gampong yang melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan gampong (BPK). Program pembangunan yang dilakukan dengan Strategi manajemen yang telah dilakukan oleh BUMG gampong di Gampong Kenawat Redelong telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan Gampong Kenawat Redelong. Pemberdayaan masyarakat melalui Unit Usaha simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong Kenawat Redelong sudah baik. Hal ini disebabkan oleh konsep bina masyarakat yang ada sudah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Kenawat Redelong.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Kenawat Redelong dalam membangun administrasi pembangunan adalah kurangnya partisipasi masyarakat dapat terlihat dari hasil wawancara diatas seperti partisipasi hanya dilakukan hanya pada saat rapat saja. Kurangnya partisipatif aktif masyarakat yang terjadi akibat beberapa faktor dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan dengan cara memberikan penguatan terhadap pembangunan gampong dan mendorong partisipasi dari masyarakat gampong pada suatu

pembangunan, akibatnya pembangunan yang dilakukan lebih inovatif ke depannya.

## 5.2 Saran

1. Pengelolaan dana gampong harus lebih terbuka, seperti dalam hal rapat masyarakat yang diundang harus lebih banyak, tidak hanya tokoh-tokoh saja, pemerintah gampong harus melibatkan anak-anak muda di Gampong Kenawat Redelong. Karena jika anak-anak muda dilibatkan maka pembangunan di Gampong Kenawat Redelong bias lebih bervariasi dan inovatif.
2. Unit Usaha Simpan Pinjam di BUMGampong harus mampu menghadirkan strategi dan program yang sesuai dengan keadaan masyarakat serta sesuai dengan potensi Gampong Kenawat Redelong. Sistem tata kelola BUMGampong harus mampu menghadirkan inovasi sehingga dapat mengembangkan BUMGampong Kenawat Redelong.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andrei Wibowo 2018 *Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Albi Anggito, Johan Setiawan “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”(Oktober 2018).
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. Vol 12. No 1
- Bella Arinta Lailiani, “Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)”, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dewi, Desilia Purnama. (2019). *Manajemen Sumber Daya Gampong*. Pamulang: UNPAM Press
- Eko Putro Widoyoko “*Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*”(Januari 2012)
- Ginanjari Kartasasmita, “*Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran Dan Praktiknya Di Indonesia*”, (Jakarta:1997)
- Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktif*”, (Juli 2013).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).
- Made Laut Mertha Jaya “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, penerapan, dan Riset Nyata*” (Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020).
- A.S. Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Miles dan Huberman, “*Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode baru*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,2007).

Melkior N.N Sitokdana, Andeka Rocky Tanaamah, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga,

Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

Muh. Fitrah, Luthfiya *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2017).

Mulyana Nana, dkk, 2012. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pelatihan Manajemen Kelembagaan Desa Bagi Sekretaris Desa. FISIP UNILA.

Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002).

Ngusmanto, M.Si, "*Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*", (Mitra Wacana Media:2015).

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015

Pandji Anoraga. Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Philip Kotler. Marketing Management, (Jakarta: Pren Hallindo, 1997).

Qanun Bupati Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015

RPJMK Kenawat Redelong 

Sahya Anggara, Li Sumantri, *-Administrasi Pembangunan*, (CV Pustaka Setia, 2016).

Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 10(2).

Siagian, S. P. (2012). Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya Jakarta : PT Bumi Aksara.

Siagian, Sondang P, "*Administrasi Pembangunan*", (Gunung Agung, 1982).

Setyo Soedrajat, Manajemen Pemasaran Jasa Bank, (Jakarta:Ikral Mandiri Abadi,1994), hal: 17

Simamora, 2006. Perencanaan Pembangunan, Sinar harapan, Jakarta.

Sugiono , “*Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta).

Sugiyono, *Metode penelitian Administratif*, (Bandung: Alfata 2021).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung:Alfabeta, 2011).

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kombinasi*” , (Bandung:2015).

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

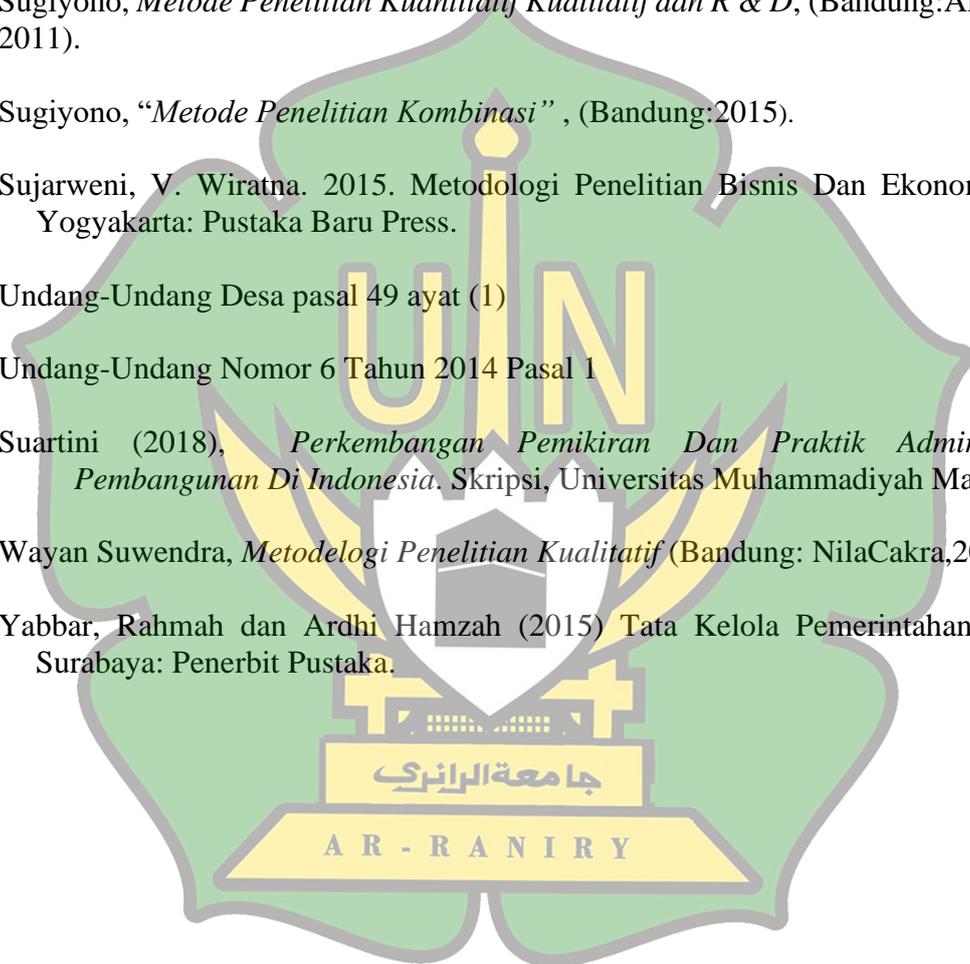
Undang-Undang Desa pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1

Suartini (2018), *Perkembangan Pemikiran Dan Praktik Administrasi Pembangunan Di Indonesia*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram

Wayan Suwendra, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: NilaCakra,2018).

Yabbar, Rahmah dan Ardhi Hamzah (2015) Tata Kelola Pemerintahan Desa. Surabaya: Penerbit Pustaka.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fisip UIN Ar- Raniry

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 863/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2022

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

#### DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 09 Maret 2022

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Menunjuk Saudara :  
1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama  
2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. : Sebagai pembimbing kedua  
Untuk membimbing skripsi  
Nama : Chandra Maulana Irfandi  
NIM : 170802020  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Strategi Pemertintah Kampung Kenawat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Pembangunan  
KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.  
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 23 Maret 2022  
Ar. Rektor  
Dekan,



Tembusan :  
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;  
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;  
4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-3146/Un.08/FISIP. WD.I/PP.00.9/12/2022  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Pemerintah Kampung Kenawat Redelong, Reje kampung Kenawat Redelong  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CHANDRA MAULANA IRFANDI / 170802020**  
 Semester/Jurusan : XI / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Kenawat Redelong

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI PEMERINTAH KAMPUNG KENAWAT KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Desember 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 27 Juni 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

### Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

#### 1. Wawancara Dengan Reje Gampong



#### 2. Wawancara Dengan Skretaris Gampong



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Chandra Maulana Irfandi  
 Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 04 Desember 1999  
 Nomor Handphone : +6282275332018  
 Alamat : Lamteumen Timur, Banda Aceh  
 Email : 170802020@student.ar-raniry.ac.id

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 37 Banda Aceh  
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 11 Banda Aceh  
 Sekolah Menengah Atas : SMK-SMTI Negeri Banda Aceh

### Sertifikat

Ma'had Jamiah : Un.08/R/PP.02.03/7496/2019  
 TOEFL : Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 TOAFL : 400 Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 KPM : 1214/Un.08/KPM-DRI/III/06/2021